

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Perpustakaan Umum

1. Pengertian Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum adalah institusi yang memberikan layanan kepada seluruh segmen masyarakat secara luas, melalui penyediaan berbagai keperluan dalam bentuk bahan bacaan dan materi edukasi yang tersedia secara terus-menerus. Menurut Pamuntjak, perpustakaan umum adalah sebuah lokasi di mana koleksi, jurnal, dan karya tulis lainnya dikumpulkan bagi kepentingan masyarakat luas. Perpustakaan umum dirancang menjadi tempat inklusif yang memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Semua anggota masyarakat dipersilahkan untuk menggunakan sumber daya dan layanan yang ditawarkan oleh perpustakaan, tanpa memandang status, pekerjaan, budaya, atau agama mereka. Selain itu, perpustakaan umum, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 43 tahun 2007, ialah lembaga yang dibangun oleh masyarakat atau pemerintah, memiliki koleksi yang sesuai dengan budaya, dan terbuka bagi seluruh anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka.

2. Peran Perpustakaan Umum

Menurut Sutarno NS (2006: 68) peran dari sebuah perpustakaan adalah melaksanakan tugasnya. Maka demikian, peran yang dilaksanakan sangat penting dan berdampak pada pencapaian misi dan tujuan perpustakaan. Setiap perpustakaan yang didirikan akan memiliki nilai jika mampu mencapai tujuannya dengan seefektif mungkin. Peran tersebut bergantung pada tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh perpustakaan. Beberapa peran yang mampu dilaksanakan oleh perpustakaan meliputi:

- a. Secara umum, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendidikan, informasi, penelitian, dan preservasi, tetapi juga sebagai pelestari warisan budaya bangsa serta sebagai tempat rekreasi yang sehat, terjangkau, dan bermanfaat.
- b. Perpustakaan berfungsi sebagai media atau jembatan yang menggabungkan

antara pengetahuan serta sumber informasi yang terdapat dalam koleksi perpustakaan bersama para penggunanya.

- c. Perpustakaan memiliki peranan yaitu membantu membina komunikasi antara para pemustaka dan penyelenggara serta komunitas yang mereka layani.
- d. Perpustakaan juga berkedudukan sebagai lembaga yang mengembangkan minat baca, kebiasaan membaca, kegemaran membaca, serta budaya baca, melalui penyediaan berbagai bahan bacaan yang selaras dalam kemauan dan keperluan masyarakat. Dengan demikian, apabila ada anggota masyarakat yang baru belajar membaca atau yang sudah mulai terbiasa membaca dan yang memerlukan sumber bacaan mungkin akan mengalami penurunan minat seiring waktu jika tidak ada perpustakaan atau jika perpustakaan yang ada tidak berfungsi dengan baik.
- e. Perpustakaan dapat berjalan aktif sebagai mediator, fasilitator, serta motivator bagi individu yang mau memanfaatkan, mencari, serta memajukan ilmu pengetahuan serta pengalaman mereka.
- f. Perpustakaan berperan sebagai agen pembawa budaya manusia, kemajuan, dan transformasi. Ini disebabkan oleh keberadaan berbagai rekaman sejarah, gagasan, dan pengetahuan yang telah terdokumentasi di masa lampau dan dijaga dalam berbagai format. Generasi saat ini memiliki kesempatan untuk menyelidiki, mempelajari, dan memperkaya koleksi ini, lalu memanfaatkannya sebagai dasar untuk merancang masa depan yang lebih baik.
- g. Perpustakaan berfungsi menjadi lembaga pendidikan nonformal bagi masyarakat dan pengunjungnya. Di sana, mereka mampu belajar secara mandiri, menggali, memanfaatkan, melakukan penelitian, selanjutnya mengembangkan sumber informasi serta ilmu pengetahuan.
- h. Petugas perpustakaan mampu berkedudukan menjadi pembimbing serta membagikan konsultasi kepada pengguna, menjalankan pendidikan pengguna (user education), serta membina dan menanamkan pemahaman tentang pentingnya perpustakaan bagi masyarakat umum.

- i. Perpustakaan berperan dalam mengumpulkan dan merawat koleksi bahan pustaka supaya selalu terjaga dengan baik, termasuk semua karya manusia yang sangat berharga dan tak ternilai.
- j. Perpustakaan bisa menjadi indikator kemajuan suatu masyarakat, yang bisa dilihat dari seberapa sering perpustakaan tersebut dikunjungi dan digunakan. Karena masyarakat yang sudah maju cenderung memiliki perpustakaan yang berkembang pula, sedangkan masyarakat yang masih dalam proses perkembangan biasanya belum memiliki perpustakaan yang memadai dan representatif. (Lestari & Subekti, 2019)

Secara tidak langsung, perpustakaan yang berguna optimal dan digunakan dengan baik mampu berkontribusi pada pengurangan serta pencegahan kenakalan remaja, misalnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tawuran, serta perilaku indisipliner.

3. Tujuan Perpustakaan Umum

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 terkait perpustakaan menyatakan bahwa tujuan dari perpustakaan adalah untuk membagikan layanan tentang sumber informasi kepada pengguna perpustakaan, mendorong dan memajukan minat membaca serta memperluas pengetahuan masyarakat guna meningkatkan kecerdasan hidup bangsa dan Negara.

B. Perpustakaan Desa

1. Pengertian Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa adalah jenis perpustakaan umum yang terletak di lingkungan kelurahan atau desa. Sebagai ujung tombak layanan perpustakaan, perpustakaan desa memiliki kedekatan yang erat melalui kehidupan masyarakat setempat. Secara legalitas formal, perpustakaan desa memiliki dasar hukum pelaksanaannya, yakni Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 mengenai Perpustakaan Desa/Kelurahan (Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001). Secara definitif, perpustakaan desa

ialah “perpustakaan masyarakat” yang berfungsi sebagai sarana atau media dalam memajukan dan mendukung aktivitas pendidikan di masyarakat pedesaan. Perpustakaan desa termasuk bagian integral dari upaya pembangunan di desa atau kelurahan. (Darmono, 2015)

2. Peran Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa mempunyai kedudukan sentral dalam mempromosikan kampanye literasi di tengah masyarakat. Ini sangat penting mengingat perpustakaan desa sering dianggap ketinggalan karena penggunaannya tidak selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Di sisi lain, perpustakaan desa harus menyediakan layanan informasi yang inklusif, tidak membeda-bedakan siapa pun berdasarkan atribut bawaannya mencakup kebangsaan, bahasa, suku, usia, agama, gender, dan status sosial.

3. Fungsi Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa berfungsi sebagai fasilitas penyediaan materi bacaan yang bertujuan untuk mendidik dan memberdayakan masyarakat. Salah satu kriteria kelompok masyarakat yang terkadang tidak dapat mengakses perpustakaan adalah mereka yang terhalang oleh jarak dan kesibukan, sehingga tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk mengunjungi perpustakaan.

Penyebaran keberadaan perpustakaan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, apalagi pada saat ini sudah banyak perpustakaan yang tersebar diberbagai daerah termasuk di desa-desa. Tujuan dari penyebaran perpustakaan hingga ke desa ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat di desa. Perpustakaan desa merupakan perpustakaan yang didirikan oleh pemerintah desa dalam membagikan layanan dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat desa. Keberadaan perpustakaan desa juga diharapkan dapat mengembangkan kegiatan literasi dan meningkatkan budaya baca masyarakat di desa. Keberadaan perpustakaan desa ini juga membantu masyarakat untuk dapat bersosialisasi di kalangan masyarakat.

Hal ini selaras pada apa yang termuat dalam OS. Al-Ma'idah: 02 yang berisi:

نَ الْبَيْتِ بَدَ وَلَا أَمْنِيَّاتِهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تُحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآ
 نَ وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ سَنَانُ قَوْمِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
 مِ الْإِصْدَاقِ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat ini mendorong setiap individu dalam menjalin hubungan dan berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Hal ini serupa dengan upaya masyarakat desa yang saling mendukung dan bersama-sama membangun desa untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Di tengah era transformasi informasi saat ini, diharapkan keberadaan perpustakaan desa dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Dengan semakin dekatnya perpustakaan dengan masyarakat, diharapkan masyarakat akan memperoleh informasi yang bermanfaat dan meningkatkan minat baca mereka. Perpustakaan desa, yang dilengkapi dengan berbagai koleksi bacaan, diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan tingkat membaca masyarakat. Selain itu, perpustakaan desa diharapkan menjadi media pembelajaran bagi masyarakat desa. Pembentukan perpustakaan desa oleh kelompok kerja masyarakat juga merupakan salah satu cara untuk membangun desa, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Zulfah & Aisa,

2018).

Menurut Sutarno Ns (dalam Bulkisma Putri, 2022) yang dikutip oleh Musvitas Sari, tujuan perpustakaan desa ialah seperti berikut:

- a. Mendukung program wajib belajar pada warga desa.
- b. Memajukan keterampilan masyarakat agar terus belajar, meningkatkan minat baca, dan semangat belajar.
- c. Memberikan hiburan serta menekankan sikap optimis terhadap pembelajaran.
- d. Melengkapi kebutuhan masyarakat akan sumber daya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan..

C. Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial

Inklusi sosial ialah suatu pendekatan yang berbasis pada sistem sosial atau pendekatan kemanusiaan (humanistic approach). Dalam pendekatan inklusif, perpustakaan dipandang sebagai bagian dari sistem sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, perpustakaan perlu diatur agar mempunyai nilai kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat. Dengan pendekatan inklusif, perpustakaan dapat berfungsi sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi pada upaya memajukan kesejahteraan serta kualitas hidup. Deklarasi World Summit of Information (WSIS) tahun 2003 mengemukakan bahwa merancang masyarakat yang inklusif, berfokus pada manusia serta berorientasi secara khusus pada pembangunan. (Woro Titi Haryanti, 2019)

Perkembangan dunia perpustakaan di Indonesia terus terjadi kemajuan dalam setiap perjalannya, terutama berkat munculnya program transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. PERPRES No. 72 Tahun 2018 tentang RKP Tahun 2019 menegaskan bahwa pembangunan perpustakaan di Indonesia pada tahun 2019 wajib fokus pada pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini dimulai pada tahun 2019 menjadi bagian dari program inklusi sosial yang lebih luas yang

diselenggarakan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS pada tahun 2020. Strategi yang diterapkan pada pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial mencakup:

1. Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran.
2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mendukung masyarakat dalam meningkatkan kemampuan literasi informasi.
4. Bekerja sama pada instansi pemerintah serta masyarakat mengenai perpustakaan.
5. Mengelola sumber daya dengan efisien untuk memperbaiki kualitas layanan perpustakaan..

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memainkan peranan utama dalam memfasilitasi masyarakat agar mampu menikmati manfaat dari perpustakaan. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh perpustakaan umum mampu dijalankan melalui beberapa strategi, diantaranya:

1. Mengidentifikasi kebutuhan pemustaka di wilayah perpustakaan desa yang sedang dikembangkan, untuk menyesuaikan dan menyediakan koleksi yang relevan dengan kehidupan masyarakat setempat.
2. Membagikan bahan bacaan agar meningkatkan pengetahuan masyarakat.
3. Memfasilitasi aktivitas masyarakat melalui kerja sama di perpustakaan desa.
4. Memberikan dukungan untuk berbagai jenis pemberdayaan serta pelatihan masyarakat.
5. Menjalankan upaya advokasi.
6. Memantau perkembangan perpustakaan desa yang sedang dikelola..

Salah satu prioritas kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui BAPPENAS dan Perpustakaan Nasional RI adalah transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, dengan fokus utama pada perpustakaan desa di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia (Bondar, 2019). Program ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, melalui penguatan literasi. Perpustakaan desa diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya tersebut dengan menyediakan beragam koleksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta menjadi tempat untuk berdiskusi, berjejaring, belajar, serta menjalankan program-program khusus yang mampu memajukan pemberdayaan masyarakat. Contohnya, program pelatihan pembuatan kerajinan tangan modern yang dapat dipasarkan, workshop terkait peternakan, pertanian, atau bisnis digital, serta pelatihan lain yang diselaraskan pada kebutuhan serta situasi lokal. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang memadai dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi guna mencapai kesejahteraan. (Prasyesti, 2021) Setiap individu memiliki kemampuan untuk menggunakan, mengakses, menciptakan, serta berbagi informasi dan pengetahuan, sehingga memungkinkan mereka, bersama dengan komunitas dan masyarakat secara keseluruhan, agar mengoptimalkan potensi mereka untuk pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup.

Perpustakaan yang mendukung masyarakat dalam memajukan potensi ini, dengan menghargai keragaman budaya, kesiapan agar beradaptasi dengan perubahan, serta membagikan peluang dalam berinovasi, serta memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan kebudayaan, dapat dianggap sebagai perpustakaan yang berbasis pada inklusi sosial.

Menurut Karen Philip agar menentukan perpustakaan menjadi lebih inklusi di tengah masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya:

1. *Make the library a welcoming place*

2. *Being kind, personable, and compassionate can go a long way*
3. *Librarians also need to understand their users, free from preconceived assumptions.*
4. *We need to listen*
5. *We need to re-imagine how our library needs to look to accommodate user needs*

Istilah inklusi sosial berasal dari konsep eksklusif sosial. Power & Wilson (2000) mendefinisikan inklusi sosial sebagai ketidakmampuan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk tetap terlibat dalam kehidupan sosial. Ini bisa terlihat dalam berbagai aspek seperti jenis kelamin, usia, ras, disabilitas, agama, latar belakang, etnis, atau status ekonomi, yang menghambat partisipasi penuh mereka bagi masyarakat (Charity Commission, 2011; Mahdi, 2020; Noor, 2019). Hal ini menyebabkan mereka terpinggirkan atau dikecualikan dari masyarakat, yang tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga komunitas secara keseluruhan. Sebagai respons terhadap ini, konsep inklusi sosial muncul, yang bertujuan untuk membuka masyarakat lebih luas dengan meningkatkan partisipasi mereka, terutama bagi mereka yang berisiko terpinggirkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah pendekatan layanan perpustakaan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas pemakai perpustakaan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengembangkan perpustakaan yang memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat. Dimaksudkan melalui adanya program ini, perpustakaan, terutama perpustakaan desa, mampu berjalan aktif dalam mendukung keberhasilan beberapa program pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 2, menyatakan bahwa "Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, profesionalisme, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan." Pernyataan ini menegaskan bahwa perpustakaan memiliki tanggung jawab menjadi tempat kemitraan serta pembelajaran yang diawasi secara terbuka serta profesional

bagi semua kalangan, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang berkeadilan serta mengukur capaian kinerja demi kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran sepanjang hayat menjadi kunci utama dalam mengembangkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan tidak sekedar berperan menjadi pusat informasi, namun juga sebagai sarana pengembangan diri masyarakat, selanjutnya mampu memajukan kesejahteraan mereka.

Di era kenormalan baru (new normal), perpustakaan dituntut berperan dalam penguatan literasi umumnya memberi dampak pada pemulihan sosial ekonomi. Perpustakaan telah menjadi ruang publik dalam belajar secara kontekstual, berbagi pengalaman, serta melatih keterampilan. Perpustakaan telah menjalankan peran literasi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tujuan dari Program Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan peran perpustakaan umum pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan demikian dapat meningkatkan tingkat literasi dan kreativitas masyarakat, serta mengurangi kesenjangan dalam akses informasi. (Maknun et al., 2021) Berikut beberapa ciri perpustakaan berdasarkan inklusi sosial:

1. Aksesibilitas Universal: Sarana dan sumber daya fisik yang ada di perpustakaan dapat dijangkau oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas;
2. Koleksi Representatif: Koleksi perpustakaan mencerminkan ragam budaya, bahasa, dan latar belakang penduduk setempat, sehingga seluruh komunitas merasa diakui;
3. Program dan Acara yang Inklusif: Program dan acara di perpustakaan didesain untuk memperhatikan minat dan kebutuhan semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang mereka;
4. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan serta pelatihan kepada staf perpustakaan tentang prinsip inklusi sosial agar mereka dapat melayani masyarakat dengan efektif, terlepas dari keragaman latar belakangnya;
5. Teknologi ramah inklusi: Mengadopsi teknologi yang mendukung akses bagi

semua, seperti perangkat lunak pembaca layar, untuk memastikan bahwa sumber daya digital dapat dijangkau oleh semua pengguna;

6. Kolaborasi dengan Komunitas: Bermitra dengan berbagai kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga lainnya untuk memahami serta memenuhi kebutuhan khusus dari beragam komunitas;
7. Pemberdayaan Masyarakat: Memberikan masyarakat kesempatan untuk terlibat aktif dalam program-program perpustakaan serta menyediakan platform bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan merayakan keragaman;
8. Pelatihan Kesadaran Inklusif: Melibatkan staf perpustakaan dalam pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keberagaman dan kebutuhan yang berbeda dari berbagai komunitas. (Rufus Abyater Kustiyarto, 2023)

Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial dimaksudkan agar mewujudkan lingkungan yang mendorong perkembangan dan kesinambungan masyarakat dengan mendorong partisipasi seluruh anggota tanpa adanya diskriminasi. Ini melibatkan usaha aktif untuk mengatasi hambatan yang dapat menghalangi akses dan partisipasi. Sebagai pusat informasi yang krusial, perpustakaan memegang peran penting dalam mendukung pembangunan masyarakat. Transformasi perpustakaan menjadi suatu kebutuhan mendesak, terutama di pedesaan, untuk menghadapi tantangan inklusi sosial.

D. Evaluasi Program

Evaluasi, secara harfiah, berawal dari bahasa Inggris "evaluation" yang merujuk pada penilaian atau interpretasi (Dharma 2000:220). Istilah ini berakar dari kata "value" yang mengacu pada nilai. Oleh karena itu, evaluasi mengindikasikan suatu tindakan atau proses dalam menetapkan nilai dari suatu hal. Evaluasi ialah bagian dari sistem manajemen yang mencakup pelaksanaan, organisasi, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Tanpa evaluasi, tidak akan ada diketahui mengenai kondisi objek yang dievaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Menurut Mehrens & Lelman (1978), evaluasi ialah suatu proses yang terlibat dalam

perencanaan, pengumpulan, dan penyediaan informasi yang penting dalam berbagai alternatif keputusan. Evaluasi melibatkan penilaian terhadap data yang terkumpul. Selain itu, evaluasi juga dianggap sebagai proses perencanaan, pengumpulan, dan penyediaan informasi yang sangat penting. Pada analisis kebijakan, evaluasi memiliki makna yang terkait, yang masing-masing menunjukkan pada penerapan berbagai nilai terhadap hasil dari kebijakan dan program tersebut.

Beberapa ahli evaluasi program dikenal sebagai pencipta berbagai model evaluasi program. Salah satu yang terkenal adalah model CIPP, yang pertama kali diperkenalkan oleh Stufflebeam pada tahun 1970. Menurut Widoyoko (2009: 181) konsep evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam menjelaskan bahwa tujuan utama evaluasi bukanlah agar membuktikan sesuatu, melainkan untuk melakukan perbaikan. Stufflebeam mengembangkan model evaluasi CIPP, yang merupakan akronim dari empat kata utama: *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*. Keempat elemen ini menjadi fokus evaluasi dan sekaligus mewakili komponen utama dalam proses suatu program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP merupakan model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem terpadu. Model ini memiliki keunikan dalam setiap tipe evaluasi yang dikaitkan dengan perangkat pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan maupun operasional program. Keunggulan model CIPP terletak pada kemampuannya menyediakan format evaluasi yang komprehensif di setiap tahap, yakni masukan, proses, konteks, serta produk. Setiap dimensi tersebut memiliki makna yakni:

1. *Context* : Evaluasi konteks bertujuan dalam penilaian masalah, aset, kebutuhan, dan peluang yang ada, sehingga mampu menolong pembuat kebijakan dalam menentukan tujuan dan prioritas. Selain itu, evaluasi ini juga mendukung kelompok pengguna lainnya dalam memahami peluang, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Evaluasi konteks membagikan gambaran menyeluruh mengenai lingkungan program, serta menilai kebutuhan serta tujuan menjadi lebih terarah. Proses ini

berisi analisis masalah yang berhubungan pada kondisi program atau situasi objektif yang dihadapi, mencakup identifikasi kelemahan serta kekuatan dari obyek yang sedang dijalankan.

2. Evaluasi *input* atau masukan berguna agar menolong dalam pengambilan keputusan terkait pengaturan sumber daya, alternatif yang akan dipilih, serta perencanaan dan strategi yang akan digunakan agar tercapai kebutuhan. Evaluasi ini juga mencakup bagaimana prosedur kerja akan diatur agar menggapai tujuan yang telah ditentukan. Informasi dan data yang terkumpul selama proses ini mampu dipakai dalam menentukan sumber daya dan strategi terbaik dalam menghadapi keterbatasan yang ada. Pada evaluasi ini, masukan (input) yang dinilai adalah komponen-komponen dalam program yang sedang dievaluasi, yaitu:

- i. Sumber daya manusia
- ii. Sarana atau peralatan yang mendukung
- iii. Anggaran atau dana
- iv. Beberapa prosedur dan aturan yang dibutuhkan.

3. Evaluasi *Process* : Evaluasi proses bermaksud agar membantu menjalankan keputusan serta menilai dan mendeteksi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan, guna mendukung pelaksana dalam menjalankan kegiatan dengan lebih efektif. Evaluasi ini mencakup pengumpulan data penilaian yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Tujuan utama dari evaluasi proses adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana telah diimplementasikan dan mengidentifikasi komponen yang memerlukan perbaikan. Evaluasi proses juga melibatkan penentuan kegiatan yang akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam program, di mana setiap unsur memiliki peran penting dalam keberhasilan program tersebut.
4. Evaluasi *Product* : Evaluasi produk berguna dalam memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan selanjutnya,

serta untuk menilai hasil yang telah dicapai setelah program berjalan. Evaluasi ini mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan data yang dihasilkan akan menentukan apakah program perlu dimodifikasi, dilanjutkan, atau dihentikan. Evaluasi produk menilai apakah hasil akhir selaras dengan rencana program yang sudah tersusun melalui proses. Jika produk akhir tidak selaras dengan proses yang telah dijalankan, hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang perlu diperbaiki. Stufflebeam memahami tujuan evaluasi produk sebagai: a. Menetapkan dan menyediakan informasi yang berguna agar menilai alternatif keputusan. b. Membantu audiens dalam mengembangkan serta menilai manfaat program pendidikan atau objek evaluasi. c. Mendukung pengembangan program serta kebijakan.

Menurut Wirawan (2011:17), program ialah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dikelola pada periode waktu tertentu. Setiap program perlu dinilai agar memilikikan apakah layanan atau intervensi yang dilakukan telah menggapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi program, menurut Tyler, ialah proses dalam menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai (Arikunto dan Jabar, 2009:5). Arikunto (2005:291) menjelaskan evaluasi program sebagai upaya untuk menentukan sejauh mana keberhasilan dari aktivitas yang telah dijalankan.

Evaluasi program umumnya diartikan sebagai proses penemuan, pengumpulan, serta penilaian data yang disajikan secara sistematis terkait nilai, perencanaan, manfaat, efektivitas, sasaran, serta kesesuaian suatu program dengan standar dan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi program ialah metode sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi guna menjawab pertanyaan mendasar terkait program yang diteliti. Evaluasi program umumnya terbagi menjadi tiga kategori: evaluasi proses (process evaluation), evaluasi hasil (outcome evaluation), dan evaluasi dampak (impact evaluation). Menurut Stufflebeam (2007), evaluasi program ialah usaha untuk membagikan informasi yang akan disampaikan kepada pengambil keputusan (Nasution et al., 2022). Evaluasi program berfungsi dalam memahami apakah tujuan program telah berhasil

direalisasikan.

Evaluasi program ialah proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan nilai, tujuan, efektivitas, atau kesesuaian sesuatu selaras dengan kriteria serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses penetapan keputusan ini didasarkan pada perbandingan yang bervariasi dalam memakai standar tertentu yang telah ditetapkan. Terdapat empat aspek penting yang diperlukan pada evaluasi program, seperti yang diungkapkan oleh Rossi dalam Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto (2013:269), yaitu:

- a. Siapa (kelompok) yang akan menerima manfaat dari program, di mana mereka berada, dan karakteristik apa yang dimiliki oleh kelompok penerima manfaat tersebut;
- b. Metode mana yang paling sesuai yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Apakah program tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- d. Seberapa besar kemungkinan keberhasilan pelaksanaan program. Di sisi lain, adapun indikator keberhasilan umumnya terlihat tingkat keberhasilan suatu program adalah:
 - 1) Program memiliki dukungan dari berbagai pihak baik bersifat material maupun imaterial.
 - 2) Berjalannya program lapangan yakni program yang telah direncanakan mampu diterapkan dengan tepat;
 - 3) Program tepat sasaran maksudnya program dipakai oleh obyek yang sebagai sasaran program;
 - 4) Tergapainya tujuan program yakni akhir dari rencana program yang telah dirumuskan. Menurut definisi dari beberapa pendapat mampu dikatakan evaluasi program ialah sebuah pengujian melalui pengukuran objektif dan analisis sistematis, terhadap cara-cara serta sejauh mana program itu tergapai tujuan yang ditentukan. Diawali proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah dimana hasilnya mampu dipakai dalam rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi

pengambil keputusan untuk perbaikan-perbaikan program yang akan datang dalam menentukan alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan.

E. Tujuan Evaluasi Program

Arikunto dan Jabar (Ashiong P. Munthe, 2015) menyebutkan bahwa tujuan dari evaluasi program ialah agar menilai pencapaian tujuan program dengan cara memeriksa pelaksanaan kegiatan program. Menurut Brikerhoff (1986:ix) yang dikutip oleh Arikunto dan Jabar, ada tujuh langkah yang wajib dijalankan pada pelaksanaan evaluasi, ialah :

1. Menetapkan fokus evaluasi (*focusing the evaluation*),
2. Merancang desain evaluasi (*designing the evaluation*),
3. Mengumpulkan informasi (*collecting information*),
4. Menganalisis dan menginterpretasi informasi (*analyzing and interpreting*),
5. Menyusun laporan (*reporting information*),
6. Mengelola evaluasi (*managing evaluation*), dan
7. Mengevaluasi evaluasi itu sendiri (*evaluating evaluation*).

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011: 114-115), tujuan dari evaluasi program adalah:

1. Mengidentifikasi kontribusi program terhadap pencapaian tujuan organisasi, yang hasil evaluasinya menjadi penting dalam pengembangan program serupa di tempat lain.
2. Menentukan keputusan mengenai kelanjutan suatu program, apakah perlu diperbaiki, dipertahankan, atau dihentikan.

Evaluasi program mampu dianggap sebagai salah satu jenis penelitian evaluatif karena bertujuan untuk memahami kondisi tertentu. Pada evaluasi program, para pelaksana harus memikirkan dan merencanakan langkah-langkah pelaksanaan penelitian tersebut.

Menurut Weiss (1972), tujuan dari evaluasi program adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada penerapan metode penelitian.
2. Memperhatikan hasil dari suatu program.
3. Menggunakan kriteria untuk melakukan penilaian.
4. Memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan dan peningkatan program di masa yang akan datang.

Menurut Kirkpatrick (1998), pentingnya evaluasi program adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan eksistensi penggunaan dana terhadap pencapaian sasaran serta tujuan program yang dilaksanakan.
2. Untuk mengambil keputusan apakah kegiatan tersebut akan berlanjut atau dihentikan, serta agar mengumpulkan informasi tentang cara mengembangkan program di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap beberapa literatur kepustakaan sebelumnya, diketahui beberapa penelitian sejenis berkaitan dengan topik evaluasi pelaksanaan program berbasis inklusi sosial di perpustakaan Mukhrim Kabupaten Bengkalis.

1. Penelitian yang dijalankan Fahmiya Azlin pada tahun 2022 yang berjudul “Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Panjang” Skripsi ini membahas evaluasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam pemberdayaan masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang. Fokus utama permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana evaluasi terhadap program perpustakaan berbasis inklusi sosial mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial dilaksanakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pustakawan dan 2 orang pengelola taman baca masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Fahmiya Azlin, 2022)

2. Penelitian yang dijalankan oleh Bulkisma Putri pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah” skripsi ini membahas tentang analisis pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah serta mengidentifikasi kendala dalam proses pengembangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah mencakup beberapa kegiatan, antara lain pemberian fasilitas kepada perpustakaan desa, sosialisasi, pelatihan pengelola perpustakaan, pelatihan revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, advokasi, peer learning meetings (PLM), stakeholder meetings, dan pelibatan masyarakat. Kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa. (Bulkisma Putri, 2022a)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Ayu Novianti, Ananda Dyah Ayu Kumala, Wahyu Enggar Wulandari, Ganis Candra Puspitadewi, pada tahun 2023 dengan judul artikel “Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Perpustakaan Umum Kota Batu Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick” penelitian yang dilakukan Dinda Ayu Novianti, Ananda Dyah Ayu Kumala, Wahyu Enggar Wulandari, Ganis Candra Puspitadewi, Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan program perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Umum Kota Batu, apakah program tersebut berjalan sesuai dengan rencana awal, dan bagaimana evaluasi pelaksanaan program berdasarkan model evaluasi Kirkpatrick. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan serta evaluasi pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Umum Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi sosial di Perpustakaan Umum Kota Batu mencakup empat layanan kegiatan: teknik decoupage, memasak, English Club, dan e-Book. Dari segi dukungan kegiatan, sarana dan prasarana di Perpustakaan Umum Kota Batu cukup memadai, baik dalam hal tempat maupun alat dan bahan yang diperlukan. Namun, pelaksanaan inklusi sosial oleh Perpustakaan Umum Kota Batu belum maksimal, sehingga tujuan akhir berupa peningkatan kesejahteraan belum tercapai. Beberapa informan tidak menerapkan program tersebut sepenuhnya karena berbagai alasan, menjadikannya hanya sebagai pengetahuan semata. (Novianti et al., 2023)
4. Penelitian yang dijalankan oleh Dinda Ayu Merlyana pada tahun 2023, yang berjudul “Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jember,” membahas tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menggunakan pendekatan pelayanan publik dengan menyediakan koleksi dan meningkatkan tingkat literasi. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya minat masyarakat dalam mendukung kegiatan inklusi sosial, yang terlihat dari jumlah peserta yang sedikit dan kurangnya antusiasme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam

pemberdayaan masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui berbagai inisiatif, seperti Perpustakaan Keliling dan Bimbingan Teknis Tata Kelola Perpustakaan. Perpustakaan Keliling menyediakan sarana dan prasarana kepada pemustaka di sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Jember, dan pada hari Minggu, biasanya beroperasi di tempat Car Free Day.

5. Penelitian oleh Serlina Agustin dan Yona Primadesi pada tahun 2024, berjudul “Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Studi Kasus di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman),” bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman dengan fokus pada tiga aspek utama: connectivity, content, dan human. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek connectivity, fasilitas untuk penyandang disabilitas belum memadai, upaya menjangkau pemustaka belum efektif, dan sistem penelusuran bahan pustaka (OPAC) tidak berfungsi dengan baik. Dari segi content, koleksi untuk penyandang disabilitas belum tersedia dan sosialisasi perpustakaan kepada masyarakat belum menyeluruh. Pada aspek human, terdapat kurangnya respons dari masyarakat, keterbatasan anggaran, serta kurangnya jaringan kemitraan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengatasi kendala tersebut dengan menjalin kemitraan bersama pengerjaan perpustakaan desa.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dengan kajian ini. Perbedaan kajian pertama oleh Fahmiya Azlin dengan kajian ini ialah kajian yang dijalankan oleh Fahmiya Azlin bertujuan agar

mendesripsikan evaluasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial terhadap pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kajian ini bermaksud agar memahami penerapan sekaligus evaluasi pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Perbedaan penelitian terdahulu kedua oleh Bulkisma Putri dengan kajian ini yakni kajian yang dijalankan Bulkisma Putri memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dipakai ialah dokumentasi serta wawancara untuk mengungkap pengembangan layanan perpustakaan. Sedangkan penelitian ini memakai metode kualitatif dengan model CIPP.

Perbedaan penelitian terdahulu ketiga oleh Dinda Ayu Novianti, Ananda Dyah Ayu Kumala, Wahyu Enggar Wulandari, Ganis Candra Puspitadewi dengan kajian ini ialah penelitian yang dijalankan oleh Dinda Ayu Novianti, Ananda Dyah Ayu Kumala, Wahyu Enggar Wulandari, Ganis Candra Puspitadewi bertujuan untuk mengetahui penerapan sekaligus evaluasi pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan model evaluasi kickpatrick. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan memakai model context, input, process, product, untuk mengevaluasi pelaksanaan program inklusi sosial maka tercipta rekomendasi untuk perbaikan dari suatu program.

Perbedaan penelitian terdahulu keempat oleh Dinda Ayu Merlyana bertujuan untuk mengetahui peran perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam pemberdayaan masyarakat pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Jember. Sedangkan kajian ini bermaksud agar mengetahui pelaksanaan program berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru dan apa saja kendala yang dihadapi.

Perbedaan terdahulu kelima oleh Serlina Agustin dan Yona bermaksud untuk mendeskripsikan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman berdasarkan aspek connectivity, aspek content, dan aspek human. Sedangkan kajian ini

mendesripsikan dengan model CIPP (Context, Input, Process, Product).

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada penjelasan yang diberikan untuk sebuah variabel dengan cara menjelaskan makna, menyebutkan kegiatan yang terlibat, atau menetapkan prosedur yang dibutuhkan dalam mengukur variabel tersebut. Agar menghindari kekeliruan serta kesalahpahaman terkait istilah-istilah yang digunakan pada kajian ini, peneliti membagikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum ialah fasilitas yang terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, berguna menjadi sumber pendidikan, rekreasi, informasi, serta penelitian bagi komunitas setempat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia di perpustakaan umum tanpa biaya, dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas kehidupan bangsa.

2. Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa ialah perpustakaan yang dijalankan secara mandiri oleh pemerintah desa atau kelurahan dan terletak di tengah komunitas desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, perpustakaan desa/kelurahan adalah fasilitas masyarakat yang berfungsi sebagai sarana dalam mendukung serta memajukan pendidikan masyarakat pedesaan, serta termasuk bagian integral dari aktivitas pembangunan desa atau kelurahan. Untuk memastikan perpustakaan desa dapat dipakai secara baik, diperlukan pengelolaan dan layanan yang efektif. Terdapat empat pilar utama pada layanan perpustakaan desa, ialah layanan pendidikan, layanan informasi, layanan penerangan, serta layanan rekreasi.

3. Inklusi

Inklusi adalah pendekatan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang terbuka dan menerima bagi setiap individu, tanpa memandang

latar belakang atau kondisi mereka. Ini mencakup berbagai aspek seperti karakteristik pribadi, kondisi fisik, kepribadian, status sosial, suku, budaya, dan lainnya.

4. Inklusi social

Inklusi sosial adalah usaha untuk menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai fondasi utama dalam mencapai kualitas hidup yang optimal. Ini adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan warga negara Indonesia yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi, serta mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inklusi sosial merupakan metode untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat. Konsep inklusi sosial pertama kali muncul di Eropa sebagai respons terhadap krisis kesejahteraan sosial yang mengarah pada masalah sosial. Untuk mencapai kebahagiaan dalam masyarakat, partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan suatu negara atau wilayah sangatlah penting, dan partisipasi ini dikenal sebagai inklusi sosial, (Susanti, 2019).

5. Perpustakaan inklusi sosial

Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang secara aktif mendukung individu dan masyarakat dalam mengembangkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperluas jaringan sosial.

6. Evaluasi

Evaluasi adalah proses menilai atau mempertimbangkan arti dan nilai dari tingkat prestasi atau pencapaian dalam suatu proses, aktivitas, hasil, atau program.

7. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah proses sistematis untuk mencari, menemukan, dan menetapkan informasi mengenai perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektivitas, dan kesesuaian suatu program dengan

kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah proses penelitian yang dijalankan melalui cara yang wajar dan alami, selaras dengan kondisi yang ada di lapangan. Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan objek secara akurat, dengan memahami kondisi objek melalui deskripsi yang mendetail dan mendalam.

Secara umum, penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam memahami fenomena yang terjadi di lapangan. Metode penelitian kualitatif menghasilkan temuan yang bersifat alami dan tidak dapat disajikan melalui prosedur statistik, melainkan dalam bentuk naratif.

Alasan peneliti memilih metode ini karena dianggap mampu mendeskripsikan, menguraikan, mengidentifikasi, dan menyajikan secara rinci evaluasi program berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru, Kabupaten Bengkalis, Riau.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Mukhrim, yang terletak di Jl. Desa Harapan Baru, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau. Adapun alasan peneliti menentukan tempat penelitian ini sebab Perpustakaan Mukhrim merupakan perpustakaan desa dibawah instansi Kelurahan/Desa yang dipilih Perpunas untuk melakukan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mana program tersebut telah dilaksanakan selama 2 tahun dan peneliti ingin mengevaluasi program inklusi sosial yang dilaksanakan.

2. Waktu Penelitian

Tabel 1
Jadwal penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2024																															
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																												
2.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
3.	Observasi Lapangan													■	■	■	■																
4.	Proses Pengumpulan Data di Lapangan																	■	■	■	■	■	■	■	■								
5.	Analisis Data																					■	■	■	■								
6.	Pembuatan Hasil Laporan Penelitian																									■	■	■	■	■	■	■	■
7.	Penyempurnaan Skripsi																													■	■	■	■

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini mencakup sumber informasi yang diperlukan selama proses penelitian, baik itu individu, objek, atau organisme yang dibutuhkan pada pengumpulan data. Istilah "responden" dipakai dalam merujuk pada subjek penelitian, yaitu orang yang memberikan tanggapan terhadap perlakuan yang diberikan kepadanya. Selain itu, subjek penelitian atau responden juga sering disebut sebagai "informan," yaitu individu yang menyediakan informasi yang diperlukan pada penelitian.

Terkait dengan judul penelitian ini, yaitu “Evaluasi Pelaksanaan Program Berbasis Inklusi Sosial di Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis”, sehingga yang menjadi subjek penelitian ialah, Kepala Perpustakaan serta 3 orang pengelola perpustakaan desa yang dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pengelola perpustakaan desa dijadikan subjek penelitian memakai teknik *purposive sampling*, yakni metode pemilihan sumber data atau subjek yang dianggap relevan dengan kajian menurut pertimbangan dan kriteria tertentu, seperti orang yang dianggap paling memahami topik yang diteliti. Dalam menentukan informasi perlu mencari tahu pihak yang paling mengerti dan paham dengan objek penelitian yang diteliti, oleh karena itu informan penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. *Purpose sampling* tidak menekankan berapa banyak informan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas, dan keragaman informasi yang dimiliki oleh informan. Oleh karena itu dalam hal ini penulis akan mewawancarai 4 orang dan alasan memilih informan

1. Informan merupakan kepala Perpustakaan dan staff di Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru
2. Informan merupakan perangkat desa yang juga mengawasi kegiatan di Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Bru

Kriteria pemilihan pengelola perpustakaan desa sebagai subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan desa yang dikelola telah menerima pembinaan dalam pengembangan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpustakaan

Mukhrim Desa Harapan Baru selama periode 2022-2024.

2. Perpustakaan tersebut masih aktif dalam melakukan layanan berbasis inklusi sosial hingga saat ini.
3. Perpustakaan desa tersebut telah menjalankan setidaknya tiga aktivitas pelibatan masyarakat.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti memutuskan untuk memilih pengelola Perpustakaan Desa Harapan Baru sebagai subjek penelitian. Dengan demikian, berdasarkan alasan pemilihan informan yang telah ditentukan, penulis memilih informan sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan
1.	Windi Setia Ningsih	Kepala Perpustakaan Mukhrim
2.	Serina Marsa	Staff Perpustakaan Mukhrim
3.	Uli Syahbara Tanjung	Perangkat Desa (bagian keuangan)
4.	Haryanto	Perangkat Desa (bagian keuangan)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode yang dipakai oleh peneliti agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap suatu objek di lingkungan, baik yang sedang berjalan maupun yang masih dalam tahap, dengan melibatkan berbagai aktivitas yang menjadi fokus kajian memakai indra (Fadli, 2021).

Dalam penelitian ini, metode observasi yang dipakai ialah observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam aktivitas sehari-hari orang yang diamati atau yang menjadi sumber data penelitian. Melalui cara ini, peneliti dapat melihat dan mempelajari permasalahan yang terjadi di lapangan yang berhubungan erat dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang bertujuan dalam mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya. Menurut penjelasan Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan khusus. Jenis-jenis wawancara, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara informal merupakan jenis wawancara di mana pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara dan bersifat spontan, terjadi dalam suasana yang biasa dan alami, di mana pertanyaan dan jawaban berlangsung secara apa adanya.
2. Wawancara dengan pendekatan petunjuk umum adalah ketika pewawancara membuat kerangka dan garis besar pertanyaan utama yang akan diajukan selama wawancara.

3. Wawancara baku terbuka adalah jenis wawancara yang menggunakan serangkaian pertanyaan standar yang sama untuk semua responden, atau biasa disebut sebagai angket wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengambilan gambar atau catatan visual selama proses pengambilan data oleh peneliti. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa penelitian telah dilaksanakan dan dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan, dan dokumentasi lapangan. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori yang relevan, memilih informasi penting, dan menarik kesimpulan. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi Data: Ini adalah tahap awal analisis yang melibatkan penyempurnaan, pengelompokan, penyaringan, dan pengorganisasian data untuk memudahkan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai penyederhanaan informasi yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian Data: Tahap ini melibatkan penyusunan data secara sistematis untuk menyajikan informasi yang dapat memudahkan penarikan kesimpulan. Penyajian data bisa mencakup deskripsi, tabel, dan bentuk lainnya yang relevan dengan penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi: Ini adalah tahap akhir analisis di mana peneliti menarik kesimpulan atau memverifikasi temuan dengan memahami maknanya. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, tetapi juga

bisa berkembang seiring dengan penelitian di lapangan. Kesimpulan ini sering kali merupakan temuan baru yang menjelaskan objek yang sebelumnya tidak jelas, serta dapat mencakup hubungan kausal, interaktif, hipotesis, atau teori.

F. Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2015: 92) menyebutkan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data ialah derajat kepercayaan atas data kajian yang didapatkan serta mampu dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sugiyono (2015) menyebutkan yakni dalam pemeriksaan keabsahan data pada kajian kualitatif meliputi uji kredibilitas (credibility), uji transferabilitas (transferability), uji dependabilitas (dependability) dan terakhir uji obyektivitas (confirmability):.

1. Uji Kredibilitas

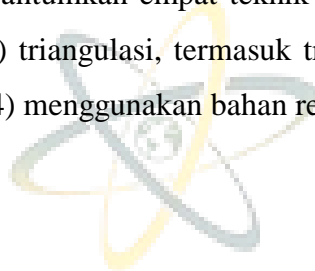
Uji Transferabilitas (Transferability) Sugiyono (2015: 376) menyebutkan bahwa uji transferabilitas ialah teknik dalam menguji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Uji ini menjelaskan seberapa baik hasil penelitian mampu diterapkan pada populasi yang lebih luas dari mana sampel diambil. Moleong (2016: 324) menjelaskan bahwa transferabilitas tergantung pada kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Pada kajian ini, peneliti akan membagikan uraian yang jelas, rinci, serta sistematis tentang hasil penelitian untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hasil penelitian pada populasi yang relevan.

2. Uji Dependabilitas (Dependability)

Prastowo (2012: 274) mengidentifikasi uji dependabilitas sebagai proses yang mirip dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif dijalankan melalui mengaudit keseluruhan proses penelitian. Sugiyono (2015: 377) menambahkan bahwa audit ini melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian. Pada kajian ini, peneliti akan menjalankan audit dengan berkonsultasi dengan pembimbing yang akan memeriksa proses dan hasil penelitian untuk mengurangi kemungkinan kesalahan.

3. Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (Confirmability)

Sugiyono (2015: 377) menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas berfungsi sebagai uji objektivitas dalam penelitian kuantitatif. Penelitian dianggap objektif jika hasilnya disepakati oleh banyak pihak. Prastowo (2012: 275) menyebutkan bahwa uji konfirmabilitas melibatkan pengujian hasil penelitian terhadap proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji kembali data mengenai manajemen sarana dan prasarana Penjasorkes di SD Negeri Kota Bengkulu. Prastowo (2012: 276) mencantumkan empat teknik untuk uji konfirmabilitas: 1) meningkatkan ketekunan, 2) triangulasi, termasuk triangulasi sumber, 3) diskusi dengan teman sejawat, dan 4) menggunakan bahan referensi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN